



Media Title	Kontan		
Head Line	Dana Pengadaan Lahan Jalan Tol Cuma Rp1,5 Triliun		
Date	3 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	20	Article Size	
Journalist	Fahriyadi	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

■ PENGADAAN LAHAN JALAN TOL

Dana Pengadaan Lahan Jalan Tol Cuma Rp 1,5 Triliun

JAKARTA. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 untuk pengadaan lahan bagi proyek jalan tol. Angka ini naik Rp 500 miliar dari anggaran 2013 lalu yang hanya Rp 1 triliun.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto menjelaskan, tambahan anggaran ini karena pemerintah ingin di masa akhir pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini proyek jalan tol segera di mulai atau *groundbreaking*. "Sebagian besar untuk ruas jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)," tandas Djoko Murjanto, akhir pekan lalu.

Beberapa proyek jalan tol yang menjadi prioritas penyelesaian pembebasan lahannya pada tahun ini antara lain ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, lalu Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan. Mes-

ki menjadi proyek prioritas, sejalinya tiga ruas ini belum ada perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Pemerintah mengakui, masih ada proyek jalan tol yang mangkrak alias tidak bisa dibangun konstruksi lantaran pembebasan lahannya belum kelar. Pemerintah juga telah berupaya memberikan dukungan pembebasan lahan.

Misalnya ruas jalan tol Depok-Antasari yang dimiliki PT Citra Waspputowa, lalu Cidere-Jagorawi milik PT Trans Lingkar Kita Jaya, dan Cibitung-Cilincing yang dipegang PT MTD CTP Expressway. Pemerintah berharap proyek-proyek ini bisa segera *groundbreaking* tahun ini.

Selain memberikan dukungan pengadaan lahan, pemerintah juga mengalokasikan dana sekitar Rp 2,1 triliun untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah (*landscaping*) seluruh ruas jalan tol yang menjadi prioritas. Dana *landscaping* ini disiapkan untuk menghindari risiko yang harus ditanggung BUUT karena kenaikan

harga tanah setiap tahunnya.

Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman berpendapat jumlah anggaran yang disediakan pemerintah untuk pengadaan lahan 2014 ini tidak akan cukup, untuk mendanai pengadaan lahan untuk seluruh jalan tol.

Ia menyebut tahapan pengadaan lahan, mulai dari persiapan seperti menggelar uji publik dengan masyarakat, pengukuran tanah hingga pembayaran tanah membutuhkan dana yang cukup besar. "Kami berharap pemerintah bisa mengoptimalkan dana ini sehingga proyek tol bisa bergulir," ujar dia penuh harap.

Nilai Rp 1,5 triliun ini lebih kecil dari kebutuhan di lapangan. Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Achmad Herry Marzuki pernah menuturkan kebutuhan anggaran pembebasan lahan tahun 2014 mencapai Rp 2 triliun.



KOMPAS/Raditya Mohendra Yasa

Pemerintah juga menyediakan dana sekitar Rp 2,1 triliun untuk dana atas kenaikan harga tanah.

Fahriyadi